



Imam Suprpto¹
 Iman Santoso²

STRATEGI MENGHADAPI BENCANA ROB MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI LAPAS KELAS IIA PEKALONGAN

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan terletak di area pesisir pantai Pekalongan sehingga rawan terkena bencana rob. Bencana rob yang terjadi memberikan dampak pada Lapas baik itu dalam segi infrastruktur bangunan, keamanan dan aspek lainnya. Hal ini tentunya mendorong petugas untuk melakukan suatu strategi dalam menghadapi bencana rob tersebut. Strategi yang dilakukan petugas akan berjalan lebih baik jika dipadukan dengan kerjasama antar stakeholder lainnya untuk menciptakan suatu kolaborasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh petugas lapas dengan stakeholder lain dalam menghadapi bencana rob di Lapas Kelas IIA Pekalongan serta melihat apa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dimana data ini kemudian diolah melalui pengumpulan data, reduksi data, pengecekan, dan penyajian data. Hasil penelitian berupa strategi yang dilakukan dalam menghadapi bencana rob melalui collaborative governance dikaitkan pada teori manajemen strategi dan teori collaborative governance. Adapun hal yang menjadi kendala yaitu belum ada koordinasi lanjutan antara lapas dan BPBD, BPBD menginduk pada Pemerintah Daerah, akses masuk Lapas terbatas, kondisi lingkungan, pembatasan solar, serta Lapas Pekalongan yang merupakan cagar budaya.

Kata Kunci: Strategi, Rob, Collaborative Governance, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The Pekalongan Class IIA Correctional Institution, situated in a coastal area, faces significant challenges from tidal flooding (rob disaster). This natural phenomenon impacts the prison's infrastructure, security systems, and various operational aspects, necessitating strategic responses from prison officials. This study examines the strategies implemented by prison officers in collaboration with stakeholders to address the tidal flooding issues at Pekalongan Prison, while also identifying implementation obstacles. Using a qualitative descriptive methodology, the research gathered data through interviews, observations, and documentation studies. The findings reveal that disaster management strategies are executed through collaborative governance, aligned with strategic management and collaborative governance theories. However, several challenges hinder effective implementation, including insufficient coordination between the prison and (BPBD), limited prison access, environmental constraints, diesel fuel restrictions, and the prison's status as a cultural heritage site. This research emphasizes the importance of enhanced stakeholder collaboration and strategic planning in managing tidal flooding impacts on correctional facilities.

Keywords: Strategy, Rob Disaster, Collaborative Governance, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Banjir rob merupakan fenomena alam yang kerap terjadi di kawasan pesisir, di mana air laut meluap dan menggenangi daratan akibat peristiwa pasang air laut. Fenomena ini umumnya terjadi pada wilayah yang memiliki elevasi permukaan tanah lebih rendah atau sejajar dengan tinggi permukaan air laut. Banjir rob berbeda dengan banjir biasa karena airnya berasal dari laut dan mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga berpotensi merusak berbagai infrastruktur

^{1,2)} Politeknik Ilmu Pemasarakatan
 email: daimganteng1@gmail.com¹, imsato1979@gmail.com²

dan bangunan yang terkena genangannya. Terjadinya banjir rob disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama adalah pengaruh gravitasi bulan dan matahari yang mengakibatkan pasang surut air laut. Selain itu, perubahan iklim global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut juga berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas banjir rob.

Fenomena bencana rob ini juga terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekalongan. Hal ini dikarenakan letak dari Lapas Pekalongan yang dekat dengan daerah pesisir pantai Pekalongan. Banjir rob yang terjadi di Lapas tentunya akan berdampak pada aspek di dalamnya seperti aspek keamanan, pembinaan, sarana prasarana dan sebagainya. Kondisi ini mendorong petugas untuk melakukan cara maupun strategi untuk menghadapi banjir dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, untuk memaksimalkan strategi maka diperlukan adanya koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan di bidang kebencanaan yaitu BPBD dan perbantuan evakuasi dari Polres Pekalongan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Peneliti akan menganalisa bagaimana strategi untuk menghadapi bencana rob dengan melihat dari berbagai sudut pandang (perspektif). Perspektif yang dimaksud adalah perspektif dari pihak Lapas Pekalongan, BPBD Kota Pekalongan serta Polres Pekalongan..

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini dirancang untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena bencana banjir rob yang terjadi di Lapas Kelas IIA Pekalongan, terutama yang berkaitan dengan strategi menghadapi bencana tersebut dengan dipadukan oleh sudut pandang eksternal yaitu BPBD Kota Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota. Data primer dan sekunder dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pihak terkait dimana narasumber pada penelitian ini yaitu Ka.KPLP, Karupam, Ka.BPBD Pekalongan, Kasat Samapta Polres Pekalongan dan anggota sat samapta Polres Pekalongan. Adapun data sekunder yang berasal dari dokumen, jurnal, arsip, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori manajemen strategi dari Fred R. David dan teori Collaborative Governance dari Ansell & Gash.

Pada penelitian ini, observasi langsung dan wawancara semi terstruktur digunakan untuk pengumpulan data. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi menghadapi bencana rob di Lapas Kelas IIA Pekalongan melalui collaborative governance serta melihat apa hal yang menjadi kendala pada pelaksanaannya. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang direduksi digunakan untuk menyaring informasi yang relevan dengan penelitian, dan penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk kisah yang menceritakan tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya, kesimpulan dibuat untuk memberikan gambaran akhir tentang hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa rob di Lapas Kelas IIA Pekalongan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan dalam kasus tertentu, genangan air rob masuk ke dalam blok hunian. Tergenangnya blok hunian oleh air rob dapat meningkatkan resiko gangguan keamanan. Selain itu, air rob yang bersifat korosif dapat merusak sarana, prasarana maupun fasilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Pekalongan. Sebagai contoh yaitu kendaraan transparan yang rusak akibat terendam oleh air rob. Kondisi bangunan yang tergolong cukup tua menambah keprihatinan. Pasalnya, pada tahun 2018 terdapat peristiwa dimana terjadi rob dengan ketinggian kurang lebih satu meter dan membuat tembok keliling roboh. Robohnya tembok sepanjang 65 meter membuat sejumlah napi dievakuasi ke lapas dan rutan di Jawa Tengah. Sebanyak 657 narapidana dipindahkan, 331 diantaranya dipindahkan ke Nusakambangan.

Petugas Lapas mengupayakan hal semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan banjir rob di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekalongan. Upaya yang dilakukan mencakup upaya sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Pada saat sebelum terjadi bencana, petugas mempersiapkan alat serta sarana prasarana yang digunakan untuk penanganan banjir seperti mempersiapkan bahan bakar solar, mempersiapkan pompa air,

sepatu boot serta melakukan himbauan kepada warga binaan agar tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya air pembuangan. Kemudian petugas juga mempersiapkan kamar mandi khusus yang hanya diperuntukkan saat terjadi bencana rob sehingga tidak ada kotoran yang berserakan.

Banjir rob yang melanda menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dan tentunya juga berpengaruh terhadap dinamika pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan. Ketika terjadi suatu gangguan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan maka akan terjadi gangguan juga pada kegiatan pembinaan di dalamnya (Novarizal, n.d.). Peristiwa rob di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan membuat beberapa blok hunian rusak dan tidak dapat difungsikan. Tidak hanya blok hunian, rumah dinas di dekat lembaga pemasyarakatan tersebut pun ikut terkena dampaknya sehingga tidak layak pakai. Beberapa area di dalam lapas ikut tergenang air dan terlihat seperti rawa buatan. Ada lokasi yang memang menjadi daerah resapan air rob dan tidak dapat dibuang. Bahkan di daerah yang terlihat seperti rawa tersebut menjadi wadah bertumbuh dan berkembang biak tanaman liar serta hewan seperti ikan-ikan kecil. Kondisi yang terparah ketika air rob mencapai ketinggian hingga membuat area kamar dalam blok hunian tergenang. Akibatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidur dengan kondisi menggantung (menggunakan sarung). Hal ini dapat beresiko terhadap keamanan serta ketertiban di dalam lapas. Jika rob sudah cukup tinggi maka yang dilakukan petugas adalah membuang air rob yang ada di dalam menggunakan pompa yang merupakan inventarisasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Strategi Menghadapi Bencana Rob Melalui Collaborative Governance

Untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Lapas Pekalongan dengan dipadukan oleh collaborative governance maka dapat ditinjau dari Teori Manajemen Strategi oleh Fred R. David yang memiliki dimensi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam melihat perspektif eksternal maka peneliti menggunakan teori collaborative governance oleh Ansell & Gash (2007) dengan dimensi proses kolaborasi dan kepemimpinan. Manajemen strategi merupakan ilmu dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap segala keputusan untuk mencapai tujuan. Fred R. David mengklasifikasikan tiga komponen utama dalam manajemen strategi yaitu perumusan strategi, pengimplementasian, dan evaluasi strategi. dan berdiskusi.

Bovaird dalam Dwiyanto (2011) mendefinisikan collaborative governance sebagai kolaborasi antara pihak otoritas dengan pihak swasta sebagai regulasi yang berlandaskan komitmen timbal balik dimana melebihi dari hal yang telah diatur pada kesepakatan antara organisasi sektor publik dan luar sektor publik. Kolaborasi yang dimaksud bersifat kemitraan. Kemitraan sendiri memiliki perbedaan dengan kontrak kerja, kepemilikan saham, dan outsourcing. Vigoda (2002) memberikan konsep pemahaman collaborative governance mengklasifikasikan enam tahapan dalam proses kolaborasi yaitu memutuskan isu kolaborasi, menentukan jenis permasalahan, mencari pihak yang terlibat, mencari tahu seperti apa implementasinya, mencari tahu bagaimana teknis pelaksanaannya, dan evaluasi prosesnya. Collaborative governance memiliki peranan sebagai mediator untuk menciptakan suatu pemahaman terhadap suatu permasalahan. Dalam teori yang diungkapkan oleh Ansell & Gash, terdapat empat dimensi dalam model collaborative governance. Dimensi tersebut yaitu kondisi awal, kerangka kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif.

Proses kolaborasi menurut Ansell & Gash merupakan sebuah model yang menjelaskan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Inti dari proses kolaboratif menurut Ansell & Gash bersifat siklis dan iteratif, dimulai dengan dialog tatap muka yang intensif antar pemangku kepentingan. Dialog ini menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Melalui dialog yang berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan komitmen terhadap proses kolaborasi itu sendiri. Komitmen ini kemudian mendorong terciptanya pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Keberhasilan proses kolaborasi sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk keseimbangan kekuatan antar pemangku kepentingan, adanya insentif yang memadai untuk berpartisipasi, sejarah hubungan yang positif, kepemimpinan yang efektif, dan desain institusional yang tepat. Namun, proses ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti waktu

yang dibutuhkan yang cenderung panjang, kebutuhan sumber daya yang besar, kesulitan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan, dan potensi konflik yang berkelanjutan. Model kolaborasi Ansell & Gash menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur dan prosesnya, tetapi juga pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang konstruktif dan mempertahankan komitmen mereka terhadap proses kolaborasi dalam jangka panjang. Berikut merupakan hasil yang diperoleh oleh peneliti :

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan keputusan dan menantisipasi kemungkinan buruk. Adapun indikator dari aspek ini yaitu memperluas visi dan misi, mengidentifikasi peluang serta hambatan, memastikan aspek kekuatan maupun kekurangan pada lingkup internal dan eksternal, menetapkan tujuan yang bersifat kontinuitas (berjangka panjang), menghasilkan strategi alternatif, dan yang terakhir menentukan strategi yang bersifat khusus. Perumusan strategi yang dilakukan dalam menghadapi bencana rob yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana (alat pompa, sepatu boot, serta MCK), membuat parameter ketinggian air.

2. Implementasi Strategi

Pada saat terjadi bencana, petugas lapas melakukan pemantauan terhadap ketinggian air serta melakukan trolling untuk memastikan keadaan warga binaan masih aman. Kemudian petugas akan mengamati kondisi lingkungan di luar lapas apakah keadaan di luar masih terendam air atau tidak. Jika kondisi air di luar sudah mulai surut maka petugas akan melakukan penyedotan air. Kemudian jika memang kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan penyedotan maka petugas akan berkomunikasi dengan pihak lain untuk mengevakuasi warga binaan.

3. Evaluasi Strategi

Dimensi ini lebih mengarahkan pada tindakan korektif serta tujuan yang bersifat jangka panjang. Dari pihak Lapas, Polres, dan BPBD Kota Pekalongan sama-sama sepakat bahwasannya pilihan yang tepat dalam menghadapi bencana rob di Lapas Pekalongan adalah dengan memperbaiki struktur bangunan dan menambah ketinggian bangunan. Namun pilihan ini merupakan alternatif dan tidak akan bertahan lama. Pihak lapas, BPBD dan Polres Pekalongan sepakat jika dilakukan relokasi.

4. Proses Kolaborasi

Komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak Lapas Pekalongan, Polres dan Pemda sudah berjalan dengan baik. Namun memang untuk koordinasi yang masih berkelanjutan hingga saat ini adalah koordinasi antara pihak Lapas dan Polres. Dimana pihak Lapas akan berkoordinasi dengan Polres Pekalongan terutama pada saat akan dilakukan evakuasi. Polres Pekalongan akan mengirimkan bantuan untuk membantu pengawalan dalam proses pemindahan warga binaan ketika terjadi bencana rob. Selain itu, pihak Polres Pekalongan selalu siap sedia untuk membantu lapas apabila terjadi keadaan kahar. Hal ini berkebalikan dengan koordinasi antara pihak lapas dan BPBD karena pihak Lapas sendiri belum pernah melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Pekalongan. Begitu juga sebaliknya dari pihak BPBD tidak memiliki inisiatif untuk berkoordinasi dengan Lapas karena BPBD sendiri menunggu instruksi dari Pemda Kota Pekalongan.

Kendala dalam Strategi Menghadapi Bencana Rob Melalui Collaborative Governance di Lapas Kelas IIA Pekalongan

1. Belum ada koordinasi yang berkelanjutan antara pihak lapas dengan BPBD Kota Pekalongan

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak lapas hanya sebatas koordinasi terkait evakuasi warga binaan dengan bantuan pengawalan dari pihak kepolisian (Polres Pekalongan). Pada saat terjadi bencana rob, hingga saat ini pihak BPBD maupun Polres belum ikut serta dalam perbantuan di lapas Pekalongan. Yang menjadi kendala dari perspektif pihak BPBD yaitu ketika hendak melakukan perbantuan ke dalam lapas tentunya harus melewati prosedur khusus karena tidak sembarangan orang dapat masuk ke lapas. Di lain sisi, pihak BPBD mengungkapkan bahwasannya pernah membantu lapas saat terjadi bencana rob yaitu untuk mengevakuasi warga binaan dan mendirikan dapur umum sementara.

2. BPBD Menginduk Pada Pemda

Kemudian hal lain yang menjadi kendala adalah terkait dengan organisasi BPBD itu sendiri yang menginduk pada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah berada di naungan

Depdagri. Sehingga harus ada koordinasi antara Kumham dan Mendagri untuk dapat bekerjasama dari pihak lapas dan pemda melalui Walikota Pekalongan. Jadi, BPBD tidak dapat melakukan inisiatif untuk membantu pihak lapas dalam menghadapi bencana rob. Padahal dari pihak BPBD sendiri memiliki alat pompa air yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan alat pompa yang dimiliki oleh pihak lapas.

3. Akses masuk lapas yang terbatas

memberlakukan SOP yang ketat. Tanpa terkecuali dengan akses masuk ke dalam lingkungan lapas. Hal ini tentunya dilakukan petugas lapas untuk meminimalisir terjadinya risiko maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Namun disisi lain, hal ini dapat menjadi hambatan pada instansi BPBD untuk dapat membantu lapas menangani bencana rob. Karena dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana, BPBD dibantu oleh relawan bencana yang ada di Kota Pekalongan yang berjumlah 38 komunitas relawan dengan total 200 orang relawan yang siap diperbantukan jika terjadi bencana. Mengingat setiap UPT Pemasarakatan memiliki prosedur yang ketat, akan menjadi hal yang tidak mudah bagi pihak BPBD untuk memberikan bantuan kepada pihak lapas.

4. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung penyedotan air

Jika terjadi bencana rob, tidak semerta-merta langsung disedot dengan pompa air. Penyedotan pompa disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada (ketinggian air). Akan menjadi hal yang percuma jika dilakukan penyedotan air namun kondisi luar lapas juga masih rob. Hal ini akan membuang bahan bakar serta tidak memberikan efek surut yang signifikan pada saat terjadi bencana rob di lapas Pekalongan. Jika tetap dilakukan penyedotan air justru hal tersebut akan memperburuk keadaan karena air dari luar turut masuk ke dalam lapas. Petugas lapas akan melihat dulu kondisi di luar apakah air sudah surut atau belum. Jadi, pada saat terjadi rob petugas akan terus memantau, mengawasi, serta mengontrol blok hunian untuk memastikan apakah kondisi masih aman atau perlu dilakukan evakuasi warga binaan ke lapas lain.

Lapas Pekalongan terletak di daerah pesisir pantai Pekalongan dimana daerah ini masuk pada kategori daerah yang rawan bencana rob. Jadi memang bukan secara spesifik hanya lapas saja yang terkena bencana rob, namun area lain yang masih dalam radius pesisir pantai Pekalongan juga terkena banjir rob. Hal ini akan diperparah jika terjadi bencana rob yang dibarengi dengan turunnya hujan. Meski demikian, petugas sudah terbiasa dengan keadaan ini sehingga dapat menghadapi bencana ini dengan persiapan serta strategi yang dilakukan. Namun, karena petugas sudah terbiasa dengan banjir rob di lapas, terdapat waktu tertentu yang sudah diperkirakan oleh petugas akan terjadi bencana rob. Namun hal yang terkadang luput adalah seberapa besar bentuk dari bencana rob tersebut. Terkadang hanya setinggi mata kaki, namun tidak jarang juga setinggi paha bahkan sampai pinggang orang dewasa. Petugas serta warga binaan juga sudah merasa terbiasa dengan fenomena ini. Sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi banjir rob bahkan jika sampai masuk ke dalam blok serta kantor.

5. Pembelian solar yang dibatasi

Petugas merasa terkendala dalam penyediaan solar karena pembelian solar yang dibatasi. Bahan bakar solar sendiri sangat dibutuhkan untuk keperluan mesin pompa. Tentunya karena persediaan solar yang terbatas, penyedotan akan dilakukan ketika kondisi air yang memang tidak dapat surut dengan sendirinya. Keadaan ini terkadang berangsur lama apalagi jika ditambah dengan terjadi hujan lebat.

6. Lapas Pekalongan yang termasuk cagar budaya

Hal berikutnya yang menjadi hambatan atau kendala pada perencanaan adalah pertimbangan bahwa lapas Pekalongan termasuk dalam cagar budaya. Jadi, secara struktur bangunan tidak dapat dirombak secara total karena akan mengubah esensi dari bangunan lapas itu sendiri. Yang dapat dilakukan sembari menunggu upaya untuk renovasi adalah melakukan perbaikan serta penambahan ketinggian bangunan dalam lapas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi terhadap strategi menghadapi bencana rob melalui collaborative governance di Lapas Kelas IIA Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Strategi dalam menghadapi bencana rob melalui collaborative governance di Lapas Kelas IIA Pekalongan

Petugas Lapas telah mengupayakan hal sebaik mungkin baik itu dalam mempersiapkan strategi maupun koordinasi antar pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Petugas Lapas dapat menangani masalah banjir rob ini secara internal, namun tentu saja jika terdapat kontribusi serta bantuan dari pihak luar sudah pasti Lapas Kelas IIA Pekalongan akan merasa sangat terbantu. Terkait dengan teori manajemen strategi dan collaborative governance, mulai dari perumusan strategi pihak lapas telah mempersiapkan hal-hal guna menangani bencana rob. Persiapan tersebut diantaranya persiapan alat pompa air, persiapan bahan bakar, persiapan sepatu boot, parameter air serta persiapan kamar mandi darurat yang hanya dipergunakan saat terjadi banjir. Kemudian pada implementasi strategi, lapas akan selalu memonitor ketinggian air serta keadaan dalam blok dan jika memang diperlukan tindak lanjut evakuasi maka pihak lapas akan berkoordinasi dengan Polres Pekalongan. Lalu pada evaluasi strategi, pihak lapas sudah mengupayakan untuk melakukan perbaikan pada bangunan lapas sembari menunggu kejelasan untuk relokasi lapas. Kemudian pada proses kolaborasi, pihak lapas sudah ada koordinasi yang terjalin antara pihak lapas,kepolisian, serta BPBD namun yang masih berlanjut adalah koordinasi antara pihak lapas dan kepolisian. Kemudian pada kepemimpinan, peran pemimpin sangatlah diperlukan sebagai motivator serta dorongan semangat pada anggotanya. Kehadiran dari sosok pemimpin akan memberikan semangat bagi anggota dalam melaksanakan tugas.

b. Kendala dalam pelaksanaan

Adapun kendala yang dialami dalam mewujudkan strategi menghadapi bencana rob di Lapas Pekalongan melalui collaborative governance diantaranya belum ada koordinasi yang berkelanjutan antara pihak lapas dengan BPBD, instansi BPBD yang masih menginduk pada Pemerintah Daerah, akses masuk lapas yang terbatas, kondisi lingkungan, pembatasan pada pembelian solar serta bangunan lapas yang masuk dalam cagar budaya Pekalongan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansyah, P., Jailani, Ms., Negeri, S., Provinsi Jambi, B., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (n.d.). Collaborative governance : dalam perspektif administrasi publik.
- El-Fath, D. D. I., Atmodjo, W., Helmi, M., Widada, S., & Rochaddi, B. (2022). Analisis Spasial Area Genangan Banjir Rob Setelah Pembangunan Tanggul di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Oceanography*, 4(1), 96–110. <https://doi.org/10.14710/ijoce.v4i1.13254>
- Khairul Rahmat, H., Pernanda, S., Casmini, C., Budiarto, A., Pratiwi, S., & Khoerul Anwar, M. (2021). THE URGENCY OF ALTRUISM AND RESILIENCE IN NATURAL DISASTER MANAGEMENT VOLUNTEERS: A LITERATURE STUDY. In *Counselling Research and Applications* (Vol. 1, Issue 1).
- Kurniawan, L. (2020). Implementasi Rambu Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Law and Justice*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10419>
- Malikhatul Izzah, T. (2022). STRATEGI ADAPTASI PETANI TAMBAK IKAN DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA LAHAN RAWAN BANJIR ROB. In *AGRIBIOS : Jurnal Ilmiah* (Vol. 20).
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854–862. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>

- Novarizal, R. (n.d.). PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PELARIAN (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru).
- Noviyanto Tilaar Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, R., Teknik Pemasaryakatan Jl Raya Gandul No, P., Kec Cinere, G., Depok, K., & Barat ABSTRAK, J. (2020). STRATEGI EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.402-408>
- Nurjanah, S., & Mursalin, E. (2021). Pentingnya Mitigasi Bencana Alam Longsor Lahan: Studi Persepsi Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 515–523. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1937>
- Pettanase, I. (2019). Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasaryakatan, halaman 57-63 (Vol. 17). Bulan Januari.
- Restu Kusumaningsih, F., Jafar Umar, M., Hanum, F., Arum, A., Ridho Fariz, T., & Vita Amalia, A. (n.d.). DAMPAK BANJIR PASANG SURUT (ROB) TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DI KOTA SEMARANG.
- Wibisono, W., Studi, P., Wilayah, P., Jurusan, K., Infrastruktur, T., & Kewilayahan, D. (n.d.). STRATEGI PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA BERDASARKAN TINGKAT KERENTANAN WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG DARI BAHAYA BANJIR ROB (Studi Kasus: Kelurahan Kangkung, Kelurahan Bumiwaras dan Kelurahan Sukaraja).
- Widya Utami, C., Rum Giyarsih, S., Aris Marfai, M., Ridho Fariz, T., Lingkungan, I., Pascasarjana, S., Gadjah Mada, U., Geografi, F., & Negeri Semarang, U. (2021). KERAWANAN BANJIR ROB DAN PERAN GENDER DALAM ADAPTASI DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA (Vol. 18, Issue 1).
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian (Cetakan Pertama). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Abussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.; Cetakan I). CV. Syakir Media Press.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Gde Satia Utama, A. A., Zonyfar, C., Nuraini, R., Silvi Purnia, D., Setyawati, I., Evi, T., Dian Handy Permana, S., & Susila Sumartiningsih, M. (n.d.). METODOLOGI PENELITIAN.
- Fred R. David. (2015). *Strategic Management Concepts and Cases* (15th ed.). Pearson Education.
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (N. Nur, Ed.; Edisi Pertama). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; Edisi Pertama). CV. Harva Creative.
- Nur Afandi, M., Sudartini, S., Tri Anomsari, E., & Novira, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative Governance dan Implementasi Pencapaian SDGs pada Studi Intervensi Stunting di Pemerintah Daerah (S. Anwar, Ed.; Cetakan Pertama). CV BUDI UTAMA.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani, Ed.). Antasari Press.
- Ramli, S. (2010a). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana* (H. Djajaningrat & R. Praptono, Eds.; Edisi Pertama). Dian Rakyat - Jakarta.
- Ramli, S. (2010b). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)* (H. Djajaningrat & R. Praptono, Eds.; Edisi Pertama). Dian Rakyat - Jakarta.
- Ramli, S. (2010c). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)* (Edisi Pertama). Dian Rakyat - Jakarta.
- Ramli Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)* (H. Djajaningrat & R. Praptono, Eds.; Edisi Pertama). Dian Rakyat - Jakarta.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek* (Cetakan I). IAIN Kediri Press.
- Salim & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Haidir, Ed.). Citapustaka Media.
- Suroso, I. (2007). *Konsep dan Teori Manajemen Strategi*. Center for Society Studies.

- Syafrida Hafni Sahir. (2021). Metodologi Penelitian (T. Koryati, Ed.; Cetakan I). PENERBIT KBM INDONESIA.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (A. L & J. B. Soedarmanta, Eds.). PT Grasindo.
- Usiono, Utami Triniswati, Nasution Fauziah, & Nanda Meuthia. (2018). Disaster Management Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan (Marwa, Ed.; Cetakan Pertama). Perdana Publishing.
- Internet dan Sumber Lainnya :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Syaiful, A. (2022). Infografis Banjir Rob Menggila di Pesisir Utara Pulau Jawa. Liputan6